

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar Fitriani Eluewarin, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*, Universitas Gadjah Mada.
- Amalia Diamantina, 2001, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Universitas Diponegoro.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Anonim, "Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators," *Australian Antarctic Magazine* 5 Winter, 2003.
- Az, Santoso Lukman dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Jawa Timur.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kapal Perikanan."
- Kenedi, 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- M Yasir Said dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusamedia.
- Maimuna Renhoran, 2012, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Arafura*, Universitas Indonesia.

- Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta.
- Rokhmin Dahuri, 2002, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Roda Bahari, Bogor.
- Sherief Maronie, "Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," 2018.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tri Andrisman , 2008, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Unung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia A Hasan, 2020, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 6, No.2,

2019.

Achmad Permadi. *Tinjauan Kritis terhadap Sistem Pemidanaan dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(4), 2020.

Ade Darmawan, Fajar Zainal, Zairion. *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 11 No. 1, 2019.

Adi Santoso, & Agus Hartanto. *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 2022.

Aditya Kusuma. *Urgensi Keadilan Konvensional dalam Pelaksanaan Pidana Penjara*. Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, Vol. 27, No.1, 2020.

Aditya R Nugraha. *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Perdagangan Maritim, 47(4), 2017.

Agustina Kusumadewi. *Optimalisasi Hukum Pidana Denda dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Yurisprudensi, 7(1), 2021.

Ananda Puspitasari. *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 6, No.1, 2019.

Anik Mardiasuti dan Agus Prasetyo. *Tantangan dan Solusi Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kelautan, Vol. 25, No. 3, 2020.

Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto, “*Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715*,” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 15, No. 2, 2020.

APEC Fisheries Working Group, “*Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*,” Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, 2008.

Arief Novi Saputra, & Siti Latipah Yatim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pemidanaan Kumulatif Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Hukum Perikanan, 9(1), 2022.

Arif Kusuma. *Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Illegal Fishing: Studi Perbandingan*. Jurnal Studi Hukum Indonesia, 8(2), 2015.

- Aris Darmawan & Ni'matul Handayani. *Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(4), 2020.
- Dedy Adrianto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 2022.
- Dhani Ariesta Harahap. *Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Nelayan Kecil dalam Konteks Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 2021.
- Dito Permana dan Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing," in "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing," 2022, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 1.
- Fitria Prastiwi dan Muhammad Fajri. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 2021
- Food and Agriculture Organization of United Nation, "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," 2001.
- Harry Parma. *Hukum Pidana sebagai Primum Remedium dalam Menanggulangi Illegal Fishing: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Hukum Asia Tenggara, 9(2), 2018.
- Henk G. De Bunt. *Fungsi Hukum Pidana dalam Mengendalikan Kejahatan Perikanan*. Jurnal Hukum Maritim Internasional, 9(6), 2004.
- Kukuh Subyakto, "Azas *Ultimum Remedium* Ataupun Azas *Primum Remedium* Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Mashuril Anwar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium*," Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," *Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013.

- Rahmat Arief Majid, & Riza Supriyadi. *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Yustisia, 9(1), 2020.
- Ria Oktaviani dan Hary Sutrisno. *Legal Protection of Fishermen in Combating Illegal Fishing*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18, No.1, 2018.
- Romli Atmasasmita, “*Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*,” Journal of Chemical Information and Modeling, 2005.
- Slamet Hadi. *Aspek Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 3, 2017.
- Sudarto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Illegal Fishing*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2(1), 2019.
- Sudaryono. *Illegal Fishing in Indonesia: An Overview of the Problems and Its Impact*. *Ocean Development & International Law*, Vol. 47, No. 3, 2016.
- Tri Astuti, & Budi Hartono Prasetyo. *Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2(2), 2021.
- Waris Sutopo, & Yustian Suryadi. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum, 5(2), 2019.
- Warjio. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kajian Hukum Dan Hukum Islam, Vol.6, No.1, 2020.
- Winda Hermawati. *Peran Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 3(2), 2018.
- Yudi Hamzah. *Illegal Fishing dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Perikanan di Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional Indonesia, 12(3), 2013.

TESIS

Akbar Fitriani Eluewarin, 2012, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*", Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Amalia Diamantina, 2001, "*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Maimuna Renhoran, 2012, "*Strategi Penanganan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Arafura*", Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Hukum Laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha perikanan Tangkap di wilayah pengelolaan perikanan indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014.

WEBSITE

Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah!, *Kementerian Kelautan dan Perikanan*.

Penangkapan Ikan Ilegal, *Wikipedia*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal, diakses 22 Desember 2022.

Ross, W.D., *Nicomachean Ethics*, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses 12 Desember 2022.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014-2021. Diakses dari <https://kkp.go.id/kinerja-kkp>

Direktorat Jenderal Putusan Mahkamah Agung RI. 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

Perancis. *Undang-Undang Republik Perancis Nomor 2016-1087 tentang Biodiversitas Laut dan Sumber Daya Laut*. Retrieved from <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746/>

Republic of Poland. *Act on Fisheries and Aquaculture of 21 November 2008*. Retrieved from <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092331256/T/D20091256L.pdf>

LAIN-LAIN

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Terjemahan UNCLOS 1982."

Putusan PN Medan 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN Md.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).(2009). Rancangan Undang-Undang Perikanan. Rapat Kerja Pembahasan antara Komisi IV DPR RI dan Pemerintah.